IMPLEMENTASI RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO

¹Aminullah, ²Dwi Mita Setyasih

Universitas Yudharta Pasuruan

aminulah@yudharta.ac.id, mitha.arashel@gmail.com

Jl. Yudharta No. 7, Sengonagung 67152 Kabupaten Pasuruan – Indonesia

Abstract

This study discusses the implementation of the Retribution areas of health service in the UPTD Health Center Puspo. The objectives of this study are: 1). To find out the implementation process of Retribution Area of health service in UPTD Health Puspo. 2). To know the factors that influence in its implementation. The method used in this research is qualitative method. With qualitative methods we can describe the regional levy for health services and the factors that influence the implementation of the levy. The results of the study showed that the implementation of regional levy has not been effective. Efforts that need to be made by local governments in order to effectively implement. The effectiveness of service levy in Puskesmas Puspo must be done according to the applicable rules.

Keywords: Health Services; implementation; Retribution

Abstrak

Studi ini membahas tentang implementasi retribusi daerah pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas Puspo dan tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui proses implementasi retribusi daerah pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puspo. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan retribusi daerah dalam pelayanan kesehatan dan faktor yang mempengaruhi implementasi retribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan implementasi retribusi daerah belum efektif. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas implementasi. Efektifitas retribusi pelayanan di Puskesmas Puspo harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi; Pelayanan Kesehatan; Retribusi

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat (Depkes RI, 2009). Sesuai pasal 30 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier. Di setiap tingkatan layanan tersebut, terbagi menjadi 2 upaya pelayanan kesehatan yaitu upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Semua fasilitas layanan tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kesehatan di instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di sisi lain peningkatan kualitas pelayanan dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, dengan kata lain dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintah. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2001 yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melakukan otonomi seluas-luasnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD merupakan suatu kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

METODOLOGI

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan memakai pendekatan deskriptif untuk menggambarkan proses pengimplementasian Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan, dengan mengumpulkan informasi yang rinci melalui pengumpulan data. Dan menggunakan metode triangulasi yang akan memudahkan kita untuk membandingkan informasi atau data. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya (Prof.Dr.H.Mudjia Raharjo:2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Elwan, L.O.M, 2011:15).

Dalam Implementasi Kebijakan Publik kita mengenal model implementasi kebijakan, dimana masing-masing model implementasi kebijakan publik memiliki variabel yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi EDWARD III, sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwasanya dalam setiap model implementasi kebijakan publik mempunyai variabel, dalam Model Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Aminullah (2015) ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh variabel *communication* (komunikasi), *resource* (sumberdaya), *disposition* (disposisi) or attitudes, dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada pasal 16 mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi. Dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. Artinya adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di tetapkan oleh kepala daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengatur mengenai Sanksi Administrasi. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen (2%) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (2) penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Dunn (dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan (Muhammad Elwan, L. O. (2020).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan dilakukan dengan lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktifitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Yaitu penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati Pasuruan ini menarik untuk dikaji, terkhusus dalam hal tata cara pemungutan retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang memberikan peluang kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan mempunyai patokan dasar.

Dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2009 bab IX pasal 31 yaitu :

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Dan jika retribusi daerah ini tidak dibayarkan maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 bab X pasal 32 yang berisi : Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Untuk penyetoran tertera pada bab XIV pasal 36 yaitu : (1) Semua hasil penerimaan dan penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD, dibukukan sebagai penerimaan daerah. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Implementasi retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas Puspo sudah cukup baik. Karena semua pelayanan kesehatan sudah tertib menggunakan standart retribusi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Permasalahan yang terjadi di Puskesmas Puspo yaitu, kurang disiplinnya petugas wilayah dalam membayar setoran retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini yang mengakibatkan terhambatnya setoran retribusi pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Sehingga dengan adanya keterlambatan ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas se Kabupaten Pasuruan.

Implementasi Strategi Peningkatan Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi, sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat

dicapaimsesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut. Kemudian strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. Sedangkan implementasi strategi adalah sejumlah tindakan atau langkah yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Didalam menjalankan suatu organisasi, pada umumnya ada tiga model proses manajemen strategi yang saling berkaitan menurut Bambang, Hariadi, yaitu: a). Perumusan strategi (*strategy formulation*) Pada tahap ini organisasi harus mampu menentukan visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. b). Implementasi strategi (*strategy implementation*) Pada tahap ini organisasi akan menjalankan strategi yang sudah dipilih dan melakukan keputusan taktis dengan efektif dan efisien. c). Evaluasi dan pengendalian strategi (*strategi control*) Pada tahap ini organisasi akan melakukan evaluasi kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi yang terbaru dihadapi oleh organisasi.

Namun dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai manajemen strategi hanya implementasi strategi (*strategy implementation*) saja. Karena dari hasil observasi dan survey yang dilakukan tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten permasalahan-permasalahan dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten untuk itu merujuk dari teorinya Bambang Hariadi, bahwa dalam implementasi strategi dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, yang ditinjau dari mempersiapkan struktur akan dinilai dari kemampuan menyusun struktur organisasi, kemampuan membagi jam kerja bagi setiap petugas penerimaan pajak dan retribusi daerah dan kemampuan melakukan koordinasi dalam melaksanakan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kemampuan menyusun struktur atau unit kerja yang akan melaksanakan penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi langkah awal bagi organisasi untuk bisa melakukan penerimaan yang maksimal. Sebab dengan pembentukan unit kerja yang sesuai dengan kebutuhan kerja akan memberikan kemudahan bagi organisasi dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan. Pengaturan waktu yang dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih atau overlepping dalam upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh organisasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya kemampuan koordinasi yang dimiliki organisasi dalam melakukan penerimaan pajak dan retribusi daerah harus dijalankan dengan baik.

Sebab koordinasi yang dilakukan dalam penerimaan pajak dan retribusi itu dilakukan bukan hanya kepada unit kerja yang ada di organisasi tersebut saja, tetapi juga dilakukan kepada organisasi yang levelnya sama guna bisa melakukan penerimaan pajak dan retribusi secara maksimal. Penyusunan struktur atau unit kerja yang disiapkan untuk melakukan penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan memang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sudah mempersiapkan diri dengan membentuk unit-unit kerja sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pemungutan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten supaya strategi yang telah disusun bisa dilaksanakan dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah secara maksimal, serta nantinya bisa menghasilkan penerimaan yang maksimal pula. Sehingga dengan adanya kesiapan unit kerja yang dimiliki, tentunya akan semakin mempermudah bagi organisasi dalam mengimplementasikan strategi yang sudah disusun. Dalam hal pembentukan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan pengaturan jam kerjanya sudah berjalan dengan lancar. Artinya setiap unit kerja mampu bekerja dengan beban tugas yang diberikan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga dengan menerapkan apa yang sudah dibagi dan dibebankan, diharapkan setiap unit kerja mampu menghasilkan pencapaian kinerja yang maksimal. Namun yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara maksimal adalah koordinasi dengan lembaga teknis lainnya. Karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten tidak dapat secara tegas mengatur lembaga teknis lainnya untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal dan memberikan laporan penerimaan secara tepat waktu. Akibatnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten hanya bisa menunggu setiap laporan yang akan diberikan oleh lembaga teknis lainnya dalam hal penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

Setiap SDM dalam organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai misi, visi dan tujuan organisasi. Sebab apabila ada keseriusan dan komitmen yang kuat tentunya akan lebih merealisasikan misi, visi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu implementasi 15 manajemen strategi dalam organisasi merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk membantu proses pencapaian tujuan yang dimaksud. Namun dalam proses implementasi manajemen strategi tentunya ada faktor-faktor yang menghambatnya. Demikian juga halnya dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, ditemukan factor-faktor penghambatnya sebagai berikut.

Kualitas SDM

Kualitas SDM merupakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugasnya. Setiap organisasi memang sangat dituntut memiliki SDM yang berkualitas supaya lebih mudah mengimplementasikan strategi kerja yang sudah disusun dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi. Didalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten masalah kualitas SDM juga menjadi sorotan sebagai penghambat kurang tercapainya tujuan kerja yang maksimal. Tanggapan ini menjelaskan bahwa kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sangat diperlukan. Karena dengan SDM yang kualitasnya sesuai kebutuhan akan mempermudah para pegawai dalam menyesuaikan diri apabila menghadapi perubahan-perubahan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya tuntutan pegawai yang berkualitas memang harus dipenuhi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, supaya setiap beban tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Penempatan SDM Penempatan pegawai adalah proses penempatan individu yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian untuk meningkatkan kinerja organisasi, guna memanfaatkan sumber daya individu secara optimal. Setiap organisasi memang harus mampu menempatkan pegawainya pada posisi yang tepat dalam organisasinya. Supaya pegawai tersebut merasa nyaman dan puas apabila mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Di dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, juga sangat dibutuhkan penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Harapan setiap organisasi memang memperoleh SDM yang berkualitas dan unggul dalam setiap bidangnya, sehingga bisa ditempatkan pada posisi yang tepat didalam organisasi. Karena dengan terjadinya penempatan pegawai yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Dalam penempatan SDM, latar belakang pendidikan memiliki peranan yang sangat penting.

Dengan memiliki pendidikan yang baik akan membentuk sikap, kemampuan dan ketrampilan SDM yang bersangkutan sedemikian rupa. Sehingga tidak mungkin dirubah dalam waktu singkat setelah SDM tersebut bekerja. Pendidikan yang bertahun-tahun ditempuh akan memperkuat minat yang sudah ada dalam diri SDM yang bersangkutan. Pimpinan yang bijak akan menjadikan latar belakang pendidikan SDM menjadi modal dasar bagi penempatan SDM. Karena pengetahuan yang dimiliki dapat membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah dibebankan.

Koordinasi antar organisasi kerja

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pelaksanaan koordinasi dilakukan karena dibutuhkan kesinergian dalam pelaksanaan kerja diantara organisasi yang berbeda, seperti persamaan persepsi, implementasi strategi yang sama dan sebagainya. Didalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, koordinasi antar lembaga teknis perlu dilakukan. Supaya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditarget dapat terwujud. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten terhadap lembaga teknis lainnya yang juga memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan koordinasi kerja antar lembaga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang kerja memang perlu dilakukan, supaya pencapaian Implementasi Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Lasmin dan Meyzi Heriyanto) 16 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 1-117 kerja yang dilakukan bersama dapat lebih maksimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sinergitas antar lembaga dalam hal penerimaan pajak dan retribusi daerah, agar tersusun strategi, langkah dan metode yang sama dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

KESIMPULAN

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, tetapi juga dari segi management yang demikian pula adanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, et all. (2015). Model Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan: *Wacana Journal for Homiletic Studies*, Vol. 18, No. 3(2015)
- Aminullah, & Aslikha. (2019). Citizen's Participation Level Analysis Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari. *SKETSA BISNIS*, 6(2), 77-86. <https://doi.org/10.35891/jsb.v6i2.1701>
- Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy. First Edition. CQ Press. USA.
- Hambali, H., Khumaidi, K., & Aminullah, A. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. *SKETSA BISNIS*, 3(2), 23-31. <https://doi.org/10.35891/jsb.v3i2.579>
- Islamy, Irfan. 2001. Seri Policy Analysis. Program Pasca Sarjana. Malang
- Kementerian Kesehatan. (2010). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009. Jakarta: Kementerian
- La Ode Muhammad Elwan, S. and A. Pramusinto (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Elwan, L. O. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH. *Journal Publicuho*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12529>
- Nugraha Muhamad Qudrat. 2007. Materi Pokok Manajemen Strategik Organisasi Publik., Jakarta: Universitas Terbuka